

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia kerja yang semakin meningkat, memacu individu untuk meningkatkan potensi dan peningkatan potensi tersebut berdampak pada instansi dalam meningkatkan kinerja. Tenaga kerja yang diperlukan disini yang benar-benar memiliki kemampuan dalam bekerja dan memiliki semangat kerja yang tinggi.

Dalam pelaksanaan dunia kerja yang terus berkembang, sumber daya manusia sebagai tenaga kerja memiliki peranan sangat penting dalam proses pencapaian tujuan dari suatu instansi/peusahaan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka instansi/perusahaan atau organisasi perlu memperhatikan efektivitas dan efesiensi yang memiliki pengaruh terhadap tujuan serta perkembangan instansi/perusahaan tersebut.

Saat ini berkembangnya profesi akuntan telah banyak diakui oleh berbagai kalangan. Dari dunia usaha, pemerintah serta masyarakat luas membutuhkan jasa akuntan dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan. Dengan demikian maka peran akuntan publik sangat penting dalam memeriksa laporan keuangan suatu organisasi atau instansi/perusahaan. Misalnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini peran auditor penting sebagai orang independent dalam memberikan pendapat atas temuan yang di dapat selama mengaudit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap seluruh unit kerja di lingkungan kementerian. Tujuan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal adalah: a. Mewujudkan sistem pengawasan pendidikan nasional; b. Meningkatkan pengawasan di pusat dan di daerah; c. Mengintensifkan pemberantasan KKN; d. Mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggara dan pengelola pendidikan; dan e. Memelihara moral penyelenggara, pengelola, pelaksana, dan pengawas pendidikan.

Salah satu program strategis Inspektorat Jenderal adalah melakukan *review* dan memberikan pendampingan penyusunan laporan keuangan unit kerja di lingkungan Kemdikbud. Kebijakan tersebut dibuat disebabkan dua tahun berturut-turut yakni tahun 2010 dan 2011 laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat opini *disclaimer* atau *no opinion* (tidak memberikan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Dua tahun sebelumnya, yakni tahun 2008 dan 2009 laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu masih bernama Kementerian Pendidikan Nasional adalah Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*).

Penurunan penilaian laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian menjadi *disclaimer* adalah di luar perkiraan semua jajaran Kemdikbud, karena sejak tahun 2011 kementerian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Road Map Menuju Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Mendapatkan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian. Inspektorat Jenderal sebagai penggagas terbitnya Permendiknas tersebut melakukan upaya agar unit-unit kerja di lingkungan Kemdikbud dapat merealisasikan aksi menuju laporan keuangan WTP, sehingga program dan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemdikbud difokuskan pada aksi-aksi pencapaian opini WTP.

Aksi menuju WTP tersebut antara lain: Inspektorat Jenderal Kemdikbud sejak tahun 2011 melakukan kegiatan pendampingan review laporan keuangan pada unit kerja khususnya pada perguruan tinggi di seluruh Indonesia, guna menjamin penyajian laporan keuangan yang handal. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan penyampaian temuan BPK-RI kepada semua unit kerja agar temuan tersebut tidak berulang. Yang sangat mendasar dilakukan Inspektorat Jenderal adalah perubahan paradigma pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang semula *post audit* atau pelaksanaan audit dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sudah terjadi menjadi *on going* audit atau pelaksanaan audit dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan atau sedang dalam proses.

Tujuannya adalah agar kelemahan, kekurangan atau penyimpangan yang ditemukan selama dilakukan audit dapat diperbaiki sehingga ketika dilakukan audit oleh auditor eksternal temuan yang sama tidak ada lagi.

Untuk mewujudkan program strategis yakni laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun 2011, maka berbagai program dan kegiatan direncanakan oleh Inspektorat Jenderal, untuk memperbaiki hal-hal penting dari temuan BPK-RI yang menjadi penyebab

laporan keuangan kementerian memperoleh opini *disclaimer* antara lain: penggunaan secara langsung penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sistem pengendalian intern (SPIP) belum dilaksanakan secara optimal, dan terdapat aset negara yang belum dapat dijamin keamanannya, dan sebagainya.

Program utama yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal adalah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Road Map Menuju Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan Nasional Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke semua unit kerja/satuan kerja di pusat dan daerah. Kegiatan tersebut melibatkan pejabat struktural, dan auditor yang diterjunkan ke daerah-daerah untuk mempresentasikan strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja guna menghindari adanya temuan dalam pengelolaan anggaran.

Kebijakan mensosialisasikan Permendikbud pada akhirnya menyebabkan auditor merasa terbebani, karena tugas dan pekerjaan auditor selama ini sudah cukup sibuk dan padat. Apabila mereka juga diberikan tugas tambahan untuk menyampaikan materi tentang Permendiknas Nomor 1 Tahun 2011. Alasan karena sibuk sebetulnya bukan menjadi faktor utama. Berdasarkan data empiris diketahui ada auditor yang tidak terbiasa menyampaikan materi layaknya guru dan dosen. Mereka juga tidak menguasai semua materi yang harus diinformasikan kepada audience yang terdiri dari para pejabat dan pengelola anggaran yang punya banyak pengalaman mengelola anggaran.

Tugas untuk mensosialisasikan Permendiknas Nomor 1 Tahun 2011 dirasakan memberatkan sebagian auditor, disebabkan mereka kurang menguasai

materi, tidak percaya diri dan tidak memiliki banyak pengalaman mengajar. Biasanya ketika bertugas melakukan audit, pekerjaan yang selalu dilakukan auditor adalah mencermati data dan dokumen, serta menggali informasi dari auditan. Sekali-kali mereka berbicara untuk menyampaikan temuan audit, namun tidak berbicara di hadapan orang banyak. Oleh karena itu, sebagian auditor nampak tertekan dengan tugas tersebut.

Terkait dengan pelaksanaan *on going* audit. Haryono Umar, Inspektur Jenderal Kemdikbud telah membuat kebijakan baru yakni sebelum pelaksanaan audit, auditor diwajibkan menyiapkan dan mempresentasikan kertas kerja audit (KKA) dan laporan hasil audit dihadapan Inspektur Jenderal. Bahkan, diinstruksikan sebelum menjadi laporan hasil audit, temuan-temuan di lapangan supaya dibahas terlebih dahulu oleh tim audit, serta dilakukan review secara berjenjang oleh auditor mulai dari ketua tim, pengendali mutu, sampai pada pengendali teknis.

Ada auditor yang menganggap kebijakan tersebut hanya menambah pekerjaan, karena sudah menjadi kebiasaan auditor Itjen tidak membuat kertas kerja audit setiap kali melakukan tugas audit, apalagi sampai dipresentasikan dan dibahas bersama dengan tim. Kebijakan untuk membahas temuan audit sebelum dituangkan menjadi laporan hasil audit juga menyebabkan laporan hasil audit harus diperbaiki sampai berulang apabila masing-masing atasan auditor mulai dari ketua tim sampai dengan pengendali mutu memberikan koreksian terhadap laporan hasil audit yang disusun oleh auditor (anggota tim).

Dengan kebijakan baru tersebut, tekanan terhadap auditor semakin tinggi karena selain dituntut memiliki ketelitian/kecermatan, dan pengetahuan atau penguasaan terhadap substansi masalah, seorang auditor dituntut menguasai teknik komunikasi. Oleh karena itu, kebijakan review berjenjang dan presentasi terhadap rencana dan laporan hasil audit pada awalnya banyak mendapat respon negatif dari auditor, apalagi bagi sebagian auditor yang masih junior adanya kebijakan tersebut merupakan pengalaman baru buat mereka.

Berdasarkan permasalahan yang telah disebut di atas, maka ada individu yang mempertanyakan kinerja auditor Inspektorat Jenderal Kemdikbud saat ini, dan menghubungkannya opini laporan keuangan Kemdikbud tahun 2011 oleh BPK-RI masih *disclaimer*. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah mungkin auditor Inspektorat Jenderal Kemdikbud dapat menunjukkan kinerja yang luar biasa di bawah tekanan berat disebabkan karena beban pekerjaan yang banyak, dan tugas-tugas baru dalam melakukan audit. Pertanyaan yang lain adalah dengan pengalaman yang ada apakah kinerja auditor Itjen dapat meningkat.

Dalam melaksanakan tugasnya, kinerja auditor Itjen Kemdikbud saat ini masih diragukan, karena berbagai program dan kegiatan audit tidak mampu mengangkat opini laporan keuangan Kemdikbud dari *disclaimer* menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP), serta kegiatan audit belum menjamin peraturan perundang-undangan ditaati oleh auditan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kinerja auditor Inspektorat Jenderal Kemdikbud supaya mampu wujudkan laporan keuangan kementerian pendidikan dan kebudayaan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari

BPK-RI pada tahun 2012, maka diperlukan situasi yang nyaman bagi auditor untuk menjalankan tugasnya. Artinya ketika melakukan pekerjaan yang dirasakan adalah bukan beban, melainkan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan. Untuk itu auditor perlu mendapat penyegaran kerja atau merasakan suasana kerja yang nyaman, yakni keadaan dimana auditor dalam keadaan melakukan pekerjaan audit bukan atas dasar keterpaksaan melainkan karena kesadaran terhadap tanggung jawab untuk membangun masyarakat Indonesia cerdas, sehingga dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain dimuka bumi.

Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dituntut memiliki pengalaman kerja yang memadai, karena dengan modal pengalaman tersebut auditor akan mampu menjalankan tugas-tugas audit secara professional, menjaga integritas moral, serta menjunjung tinggi kode etik auditor. Oleh sebab itu, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat memfasilitasi para auditornya agar memiliki banyak pengalaman, misalnya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan, melakukan studi banding ke kementerian yang telah menerapkan audit kinerja dan audit berbasis risiko, mengadakan diskusi, seminar, workshop berskala nasional atau internasional. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penelitian ini penulis beri judul: **“Pengaruh tekanan kerja, pengalaman kerja terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a) Apakah tekanan kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ?
- b) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ?
- c) Apakah tekanan kerja dan pengalaman kerja berpengaruh simultan terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penilaian *disclaimer* oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia seperti yang dijabarkan pada latar belakang masalah membuat Inspektorat Jenderal melakukan berbagai upaya agar laporan keuangan Kemdikbud dapat meraih opini WTP. Dampaknya adalah auditor dituntut melakukan tugas dan pekerjaan baru yang selama ini tidak mereka lakukan. Hal tersebut membuat sebagian auditor merasa terbebani. Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) Mengetahui seberapa besar pengaruh tekanan kerja terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b) Mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- c) Mengetahui seberapa besar pengaruh tekanan kerja, pengalaman kerja secara bersama terhadap kinerja auditor internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.4. Manfaat Penelitian

Opini disclaimer oleh BPK-RI terhadap laporan keuangan Kemdikbud selama dua tahun berturut-turut yakni tahun 2010 dan 2011 menyebabkan Inspektur Jenderal Kemdikbud mengambil kebijakan strategis seperti mensosialisasikan Permendiknas Nomor 1 Tahun 2011, mereview laporan keuangan unit kerja/satuan kerja, mempresentasikan program dan laporan audit, serta review berjenjang temuan-temuan audit. Akibatnya, auditor yang belum berpengalaman dengan tugas dan pekerjaan baru tersebut merasa terbebani. Kondisi tersebut memunculkan persoalan yakni pengaruh tekanan kerja, pengalaman kerja secara bersama terhadap kinerja auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Penelitian ini bagi para praktisi dalam hal ini para auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam membangun situasi dan kondisi kerja yang kondusif, dan mengembangkan sikap profesionalisme auditor yang selalu fokus pada pencapaian kinerja pada setiap pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Untuk kalangan akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan lebih lanjut, bagaimana pengaruh tekanan kerja, pengalaman kerja secara bersama terhadap kinerja auditor.